PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN YAYASAN KEAGAMAAN PADA YAYASAN EKA DHARMA DAUN TERATAI EMAS

Henryanto Wijaya¹, Selvia Putri Patricia² & Sheila Elita Nanang³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: henryantow@fe.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: selvia.125210036@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: sheila.125210044@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Yayasan Eka Dharma Daun Teratai Emas is a foundation that operates in the religious sector. Where there is still a lack of understanding of the tax aspects of religious foundations, this can lead to errors in income tax reporting. So in order to equip foundation administrators with tax insight, our PKM team from the Faculty of Economics and Business, Tarumanagara University will carry out outreach and training on the application of income tax for religious foundations. With this activity, it is hoped that religious foundations can carry out their tax obligations properly and correctly in accordance with the provisions of the applicable tax regulations. And you can also take advantage of tax incentives obtained by religious foundations. The solution we provide is to conduct an FGD (Forum Group Discussion) together with the foundation management to identify the problems in Yayasan Eka Dharma Daun Teratai. We found that socialization regarding the calculation of income tax on religious foundations is very necessary. Starting from explaining the taxation aspects of religious foundations, good recording or bookkeeping, preparing financial reports, and until calculating the income tax. Through these stages, it is hoped that we can produce good output by implementing the solutions offered. Not only the implementation of the above aspects, but supervision from the management of the foundation also needs to be carried out so that the implementation of the above can be carried out properly and correctly. Regular evaluation is also needed to increase the credibility of financial reports. So that in this way, Yayasan Eka Dharma Daun Teratai can report its income tax properly and be free from tax sanctions.

Keywords: *religious foundations, income tax, incentive*

ABSTRAK

Yayasan Eka Dharma Daun Teratai Emas merupakan yayasan yang bergerak di bidang keagamaan. Dimana masih kurangnya pemahaman atas aspek perpajakan yayasan keagamaan dapat menimbulkan kesalahan dalam pelaporan pajak penghasilan. Sehingga dalam rangka memperlengkapi pengurus dengan wawasan perpajakan tersebut, tim PKM kami yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara akan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan penerapan pajak penghasilan bagi yayasan keagamaan. Dengan kegiatan ini diharapkan agar yayasan keagamaan dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dan juga dapat memanfaatkan insentif perpajakan yang didapatkan oleh Yayasan keagamaan. Solusi yang kami berikan adalah dengan melakukan FGD (*Forum Group Discussion*) bersama dengan pengurus yayasan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami. Kami menemukan bahwa sosialisasi mengenai perhitungan pajak penghasilan atas yayasan keagamaan sangat perlu untuk dilakukan. Dimulai dari penjelasan aspek perpajakan yayasan keagamaan, pencatatan atau pembukuan yang baik, pembuatan laporan keuangan, hingga perhitungan pajak penghasilan. Melalui tahapan tersebut diharapkan dapat menghasilkan *output* yang baik dengan menerapkan solusi yang ditawarkan. Tidak hanya penerapan aspek-aspek diatas, namun pengawasan dari pihak manajemen pengurus yayasan juga perlu dilakukan sehingga pelaksanaan hal diatas dapat dilakukan dengan baik dan benar. Evaluasi rutin juga diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Sehingga dengan demikian, Yayasan Eka Dharma Daun Teratai dapat melaporkan pajak penghasilannya dengan baik dan terbebas dari sanksi perpajakan.

Kata kunci: yayasan keagamaan, pajak penghasilan, insentif

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan keagamaan termasuk dalam kategori ini. Dimana walaupun merupakan entitas nirlaba yang tidak

bertujuan untuk mencari keuntungan, Yayasan keagamaan tetap dianggap sebagai subjek pajak menurut Undang-Undang Penghasilan (UU PPh).

Yayasan Eka Dharma Daun Teratai Emas merupakan Yayasan keagamaan yang berfokus pada pengajaran Buddha, pengembangan spiritual serta pelayanan masyarakat. Yayasan ini juga menyediakan tempat ibadah yaitu vihara dan juga membentuk komunitas yang saling mendukung antar umat Buddha. Meskipun Yayasan keagamaan berfokus pada kegiatan non-profit, namun Yayasan keagamaan wajib menyelenggarakan pembukuan dan melaporkan pajak penghasilan secara mandiri sesuai dengan *self-assessment system* yang diterapkan di Indonesia. Menurut Chairil Anwar Pohan (2017), *self-assessment system* sendiri merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dengan demikian, maka Yayasan keagamaan perlu mengetahui dan memahami aspek perpajakan pada Yayasan keagamaan yang ada di Indonesia.

Yayasan keagamaan akan dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang merupakan objek pajak. Jenis penghasilan yang merupakan objek pajak bagi Yayasan keagamaan adalah penghasilan dari usaha atau kegiatan, bantuan atau sumbangan yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan, bunga dari investasi, sewa atau imbalan lain terkait penggunaan harta yayasan dan keuntungan dari pengalihan harta seperti penjualan aset. Dan seperti yang telah diatur dalam PMK No. 90 Tahun 2020 bahwa bantuan atau sumbangan dan harta hibahan dengan ketentuan tertentu dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Selain berperan sebagai wajib pajak, Yayasan keagamaan juga dapat berperan sebagai pemotong pajak. Yayasan wajib untuk memotong pajak atas penghasilan yang diberikan kepada karyawan yaitu PPh Pasal 21 maupun pembayaran terhadap jasa yaitu PPh Pasal 23 kemudian menyetornya ke negara.

Dalam menjalankan kepatuhan perpajakan, Yayasan keagamaan juga diwajibkan untuk melakukan pembukuan untuk memastikan semua transaksi tercatat dengan rapih dan tepat sehingga dapat membantu dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan yang telah dikurangi dengan biaya atau pengeluaran yang diizinkan oleh peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Setelah mendapatkan Penghasilan Kena Pajak, barulah nominal tersebut yang akan dikalikan dengan tarif perpajakan yang berlaku. Kemudian Yayasan Keagamaan juga wajib untuk melaporkan SPT Tahunan. SPT Tahunan merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan (Sihombing & Sibagariang, 2020). Yang dilaporkan mencakup juga semua penghasilan dan pajak yang telah dipotong atau dibayar selama tahun berjalan.

Selain aspek perpajakan yang telah disebutkan diatas, Yayasan keagamaan juga memiliki pengecualian dan insentif perpajakan yang berlaku di Indonesia. Menurut PMK No. 18 Tahun 2021 yang telah mengalami penyempurnaan, bahwa apabila lembaga sosial atau keagamaan menggunakan paling sedikit 25% dari sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana prasarana sosial atau keagamaan maka sisa lebih yang diterima dapat dikecualikan dari objek pajak. Terdapat juga pengecualian untuk kegiatan keagamaan yang tidak mencari keuntungan seperti pemeliharaan tempat ibadah juga dapat dikecualikan dari pajak penghasilan.

Dengan penyajian pemahaman diatas, masih banyak Yayasan keagamaan yang belum memahami aspek perpajakan yang perlu diperhatikan. Sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Maka dari itu melalui PKM ini, diharapkan agar pengurus Yayasan Eka Dharma Daun Teratai Emas dapat dilengkapi dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang perpajakan sehingga mitra dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan

benar di kemudian hari. Dengan demikian solusi yang dapat kami tawarkan untuk mengatasi masalah kurangnya pengetahuan mengenai perhitungan pajak penghasilan di Yayasan Eka Dharma Daun Teratai adalah sebagai berikut:

1) Pengelolaan keuangan yang transparan

Pada tahap ini, diperlukannya pencatatan keuangan yang rapi dan terstruktur. Serta diperlukannya pemisahan kekayaan pribadi pendiri/yayasan dengan transaksi yang sebenarnya dilakukan oleh yayasan. Pencatatan atau pembukuan harus dilakukan sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Perlu diperhatikan dengan *detail* sehingga tidak terjadi salah catat atau salah mengklasifikasikan akun dalam transaksi tersebut.

1) Pemanfaatan fasilitas perpajakan

Sebelum melakukan perhitungan dan pelaporan perpajakan, penting bagi pengurus yayasan untuk mengetahui fasilitas perpajakan yang didapatkan oleh yayasan keagamaan. Fasilitas perpajakan yang dapat diberikan kepada yayasan keagamaan diantaranya adalah: (a) Sumbangan atau hibah yang diterima yayasan keagamaan dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan, selama tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak pemberi dan penerima; (b) Objek pajak yang digunakan untuk kepentingan umum di bidang ibadah tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan; dan (c) Sumbangan keagamaan yang diberikan melalui lembaga resmi dapat menjadi biaya pengurang pajak penghasilan bagi donatur.

2) Perhitungan pajak penghasilan

Setelah dilakukannya pembukuan atau pencatatan keuangan, maka dilanjutkan dengan perhitungan pajak penghasilan. Perhitungan dimulai dari pembuatan neraca dan laporan laba rugi secara komersial. Kemudian dilanjutkan dengan pengurangan atau penambahan akibat dari koreksi fiskal positif maupun negatif. Koreksi fiskal positif dan negatif diatur secara jelas dan rinci dalam Undang-Undang Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 tentang pengaturan pendapatan dan biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan. Setelah memperhitungkan koreksi fiskal, maka akan didapatkan perhitungan secara fiskal yang menghasilkan penghasilan netto secara fiskal yang akan dianggap sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP akan dibulatkan dan dikalikan dengan tarif perpajakan sebesar 22%. Namun apabila penghasilan bruto masih kurang sampai dengan 4,8M maka akan mendapatkan fasilitas pengurangan 50% dari tarif yang berlaku. Apabila penghasilan bruto diantara 4,8M hingga 50M maka atas pajak terutang dihitung secara proporsional. Dan bila penghasilan bruto diatas 50M maka akan dikenakan tarif 22% langsung atas PKP. Pajak terutang yang telah didapat akan dikurangkan dengan kredit pajak (bila ada), barulah didapatkan pajak terutang yang harus dibayarkan.

4) Pelaporan pajak yang benar

Langkah selanjutnya setelah menghitung pajak penghasilan adalah melakukan pembayaran pajak terutang. Perlu diketahui bahwa batas pembayaran pajak terutang atas SPT Masa adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Dan batas pembayaran SPT Tahunan adalah 4 bulan setelah tahun pajak berakhir. Setelah melakukan pembayaran, maka pengurus wajib untuk mengisi SPT dan melaporkannya sebelum batas waktu yang ditentukan. Batas waktu lapor SPT Tahunan adalah 4 bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila telat bayar maupun lapor akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan dengan dikirimkannya STP (Surat Tagihan Pajak).

5) Penggunaan surplus/sisa lebih dengan tepat

Apabila terdapat surplus/sisa lebih, maka lebih baik bagi yayasan keagamaan untuk mengalokasikan surplus untuk pengembangan sarana/prasarana yayasan dalam jangka waktu 4 tahun untuk menghindari pengenaan pajak. Yayasan keagamaan harus menggunakan paling sedikit 25% dari sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana prasarana keagamaan dalam jangka waktu yang telah disebutkan diatas serta wajib untuk melaporkan sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan kepada KPP setempat pada lampiran SPT setiap tahunnya. Jika

sisa lebih tidak digunakan sesuai dengan ketentuan yaitu dalam jangka waktu 4 tahun, maka akan diakui sebagai objek pajak pada tahun pajak kelima.

Selain langkah-langkah diatas dalam rangka menambah wawasan pengurus dan juga kualitas sumber daya manusia, Yayasan Eka Dharma Daun Teratai juga dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dalam melakukan pencatatan, perhitungan, dan pelaporan untuk memudahkan pengurus. Tidak hanya itu, manajemen pengurus yayasan juga perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perhitungan dan pelaporan perpajakan. Manajemen pengurus yayasan perlu untuk memastikan bahwa dokumentasi perlu dijalankan dengan baik sehingga bukti transaksi yayasan disimpan dengan baik. Evaluasi berkala juga diperlukan sehingga kredibilitas laporan keuangan dapat terjamin serta yayasan dipastikan telah menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku dengan baik, menghitung serta melapor pajak dengan tepat waktu, dan menggunakan fasilitas perpajakan atas yayasan keagamaan dengan maksimal.

Dengan solusi diatas, diharapkan Yayasan Eka Dharma Daun Teratai dapat menjalankannya dengan baik sehingga dapat menjadi Wajib Pajak yang patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Yayasan juga dapat merancang strategi perpajakan dan menggunakan fasilitas perpajakan yang ada untuk dapat terus melaksanakan tujuan dari Yayasan keagamaan mereka kepada sesama maupun pembangunan fasilitas sosial atau keagamaan dengan meminimalisir pajak yang perlu dibayarkan dengan ketentuan yang ada. Hal ini juga membuat yayasan terhindar dari sanksi perpajakan yang akan merugikan perekonomian yayasan serta menurunkan citra Yayasan Eka Dharma Daun Teratai

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Setelah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu kurangnya wawasan mengenai perhitungan perpajakan bagi Yayasan keagamaan, maka tim PKM kami yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara ingin menyediakan solusi kepada mitra. Solusi tersebut berupa cara perhitungan pajak penghasilan, maupun aspek perpajakan lainnya pada Yayasan keagamaan. Dalam mencapai hal tersebut, kegiatan PKM ini akan dilakukan dalam beberapa tahapan yang dimulai dari melakukan observasi/survey, kemudian melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai forum diskusi terbuka antar tim dan mitra agar dapat mengidentifikasi serta menawarkan solusi yang tepat bagi permasalahan yang dihadapi. Dari hasil *FGD*, tahapan berikutnya dalam kegiatan PKM ini adalah dengan diadakannya sosialisasi dan pelatihan untuk pengurus Yayasan Eka Dharma Daun Teratai Emas mengenai perhitungan pajak penghasilan dan aspek perpajakan bagi Yayasan keagamaan. Hal ini dikarenakan menurut kami sosialisasi akan hal tersebut paling cocok untuk dijadikan topik dalam menyelesaikan permasalahan mitra.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan *FGD* dengan pengurus Yayasan Eka Dharma Daun Teratai, ditemukan bahwa pengurus yayasan masih kurang memahami pencatatan akuntansi, dimana pencatatan akuntansi masih tidak dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Mereka masih mencatat penerimaan dan pengeluaran secara manual serta belum ada pemisahan pencatatan atas aset, pendapatan, dan beban yang jelas. Dokumen transaksi yayasan juga tidak tersimpan dengan baik. Pengklasifikasian akun transaksi juga terkadang terdapat kesalahan atau kekeliruan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan juga belum lengkap dan jelas.

Pengurus yayasan juga merasa masih sulit dalam mengklasifikasikan penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan serta belum melakukan pemotongan atas PPh 21, 23, dan 4(2) terhadap pihak ketiga. Aspek perpajakan dari perhitungan pajak terutang, pengisian SPT, dan pelaporan

SPT juga masih belum berjalan dengan baik. Pengetahuan tentang aspek perpajakan yayasan keagamaan seperti fasilitas yang dapat dimiliki oleh yayasan keagamaan juga masih minim dimiliki oleh pengurus. Yayasan tidak menggunakan fasilitas perpajakan yang berlaku dengan maksimal. Pengalokasian sisa lebih juga belum digunakan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundangan pajak yang berlaku agar mendapatkan fasilitas dari pemerintah.

Selain daripada itu, pengawasan dari pihak manajemen pengurus yayasan pun masih kurang. Pihak manajemen yayasan sendiri mengakui bahwa mereka masih kurang memahami pencatatan akuntansi maupun sampai pelaporan perpajakan serta fasilitas yang ada sehingga mereka tidak dapat melaksanakan tugas pengawasan mereka dengan baik. Evaluasi rutin juga masih kurang berjalan dengan baik dan kritis sehingga penyimpangan dan kesalahan serta ketidaktahuan terus terjadi pada mitra.

Sebagai langkah awal untuk mengatasi permasalahan ini, tim PKM melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pengurus yayasan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan menawarkan solusi. FGD tersebut diikuti dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengurus yayasan tentang perhitungan pajak penghasilan dan aspek perpajakan lainnya. Dalam pelatihan ini, tim memberikan penjelasan mendalam tentang pentingnya pembukuan yang rapi, perhitungan pajak penghasilan, pemanfaatan fasilitas perpajakan, serta pengawasan dan evaluasi rutin. Pengurus yayasan juga diberikan simulasi perhitungan pajak dan pengisian SPT Tahunan agar mereka lebih memahami proses yang harus dilakukan.

Selain itu, tim juga memberikan panduan tentang penggunaan teknologi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, seperti aplikasi atau software akuntansi yang dapat membantu yayasan mencatat transaksi dengan lebih rapi dan akurat. Dalam pelatihan ini, pengurus yayasan diajarkan cara memisahkan pencatatan atas aset, pendapatan, dan beban, serta cara menyimpan dokumen transaksi dengan baik. Tim juga menjelaskan pentingnya memanfaatkan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah, seperti pengurangan tarif pajak atau pengecualian objek pajak, sehingga yayasan dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk kegiatan sosial dan keagamaan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut. Pengetahuan mengenai pencatatan akuntansi dan aspek perpajakan, seperti perhitungan pajak penghasilan serta pemanfaatan fasilitas perpajakan bagi yayasan keagamaan, merupakan hal yang sangat penting dan perlu menjadi perhatian utama pengurus yayasan. Pencatatan yang rapi dan akurat akan menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan jelas, memungkinkan yayasan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap yayasan sekaligus memperkuat citra positifnya sebagai lembaga yang profesional dan transparan. Dalam kegiatan ini, tim PKM memberikan kontribusi nyata dengan menyediakan pelatihan dan bimbingan kepada mitra terkait pencatatan akuntansi yang sesuai dengan standar serta pengelolaan perpajakan. Pelatihan mencakup pengisian SPT, simulasi perhitungan pajak, dan pemanfaatan teknologi untuk membantu pembukuan yang lebih efektif. Selain itu, tim juga membantu mitra memahami dan memanfaatkan fasilitas perpajakan, seperti pengecualian objek pajak dan pengurangan tarif pajak, yang dapat mendukung keberlanjutan kegiatan sosial dan keagamaan yayasan. Namun, perlu diakui bahwa peraturan perpajakan terus berkembang dan berubah seiring waktu. Oleh karena itu, pengurus yayasan harus terus memperbarui pengetahuan mereka tentang regulasi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan yayasan keagamaan, agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menghadapi

kompleksitas peraturan, mitra dianjurkan untuk mendapatkan panduan lebih lanjut dari konsultan pajak profesional atau memanfaatkan layanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Tarumanagara, Wakil Rektor 1 Universitas Tarumanagara, dan Wakil Rektor 2 Universitas Tarumanagara atas dukungan dan arahan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pendanaan bagi kegiatan ini, sehingga dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu atas segala bantuan dan kontribusinya dalam mendukung kelancaran kegiatan ini.

REFERENSI

- Aspek Pemajakan pada Yayasan atau Organisasi Nirlaba. (2021, Desember 9). *Accounting Binus*. Diakses dari <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/09/aspek-pemajakan-pada-yayasan-atau-organisasi-nirlaba/>
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *Perpajakan-Edisi Terbaru*. Jakarta: Andi.
- Marsono, M., & Muamarah, H. S. (2019). Penghasilan yayasan keagamaan, objek pajak?. *KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*, 1(1), 49–56.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.03/2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Bantuan atau Sumbangan, serta Harta Hibahan yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan komprehensif pengantar perpajakan edisi 2: Teori dan konsep hukum pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.